

## Kampanye Anti-Politik Uang dalam Pemilu pada Masyarakat Citta Kabupaten Soppeng

**Lukman<sup>1\*</sup>, Mufassirah<sup>2</sup>, Iswandi Amiruddin<sup>3</sup>.**

<sup>1</sup>Ilmu Komunikasi, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

<sup>2</sup>Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

<sup>3</sup>Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

\*E-mail: lukmanjunaedy23@gmail.com

### **Abstract**

*Community service conducted in Citta District, Soppeng Regency, aims to increase public awareness of the dangers of money politics and the importance of active participation in the Election. This program involves various educational activities, such as socialization, discussions, and distribution of brochures, which aim to provide an understanding of the negative impacts of money politics on the quality of democracy and leadership integrity. As a result, the community began to understand that voting rights should not be traded and were more motivated to vote based on the quality of the candidate for leader. In addition, youth and women's groups were involved as agents of change in voicing their rejection of money politics. The success of this program was supported by collaboration between the community, local government, and related institutions, as well as recommendations for sustainability, such as strengthening local regulations, ongoing political education, and creative technology-based campaigns. This program is the first step in building a healthy and dignified democracy at the local level, which is expected to be adopted by other regions to create clean and integrated elections.*

**Keywords:** Money Politics; Empowerment; Election

### **Abstrak**

Pengabdian masyarakat yang dilakukan di Kecamatan Citta, Kabupaten Soppeng, bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya politik uang dan pentingnya partisipasi aktif dalam pemilu. Program ini melibatkan berbagai kegiatan edukasi, seperti sosialisasi, diskusi, dan pembagian brosur, yang bertujuan memberikan pemahaman tentang dampak negatif politik uang terhadap kualitas demokrasi dan integritas kepemimpinan. Hasilnya, masyarakat mulai memahami bahwa hak pilih tidak seharusnya diperjualbelikan dan lebih termotivasi untuk memilih berdasarkan kualitas calon pemimpin. Selain itu, kelompok pemuda dan perempuan dilibatkan sebagai agen perubahan dalam menyuarakan penolakan terhadap politik uang. Keberhasilan program ini didukung oleh kolaborasi antara masyarakat, pemerintah daerah, dan lembaga terkait, serta rekomendasi keberlanjutan seperti penguatan regulasi lokal, pendidikan politik berkelanjutan, dan kampanye kreatif berbasis teknologi. Program ini menjadi langkah awal dalam membangun demokrasi yang sehat dan bermartabat di tingkat lokal, yang diharapkan dapat diadopsi oleh daerah lain untuk menciptakan Pemilu yang bersih dan berintegritas.

**Kata Kunci:** Politik Uang; Pemberdayaan; Pemilu

**Received: 07 August 2024**

**Revised: 24 August 2024**

**Accepted: 10 September 2024**

How to Cite : Lukman, Mufassirah, & Amiruddin, I. (2024). Kampanye Anti-Politik Uang dalam Pemilu pada Masyarakat Citta Kabupaten Soppeng. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Nasyiatul Aisyiyah Sulawesi Selatan* Vol 4. No. 2 (page 53-60)

## PENDAHULUAN

Politik uang (*money politic*) merupakan salah satu fenomena yang sering muncul dalam proses pemilihan umum di Indonesia (Nabila, et al., 2020). Praktik ini mencakup pemberian uang atau barang kepada pemilih dengan tujuan memengaruhi pilihan politik mereka yang pada akhirnya merusak prinsip demokrasi (Fitriani, et al., 2019). Politik uang tidak hanya menurunkan kualitas pemilu, tetapi juga dapat menimbulkan efek jangka panjang berupa lemahnya integritas pemimpin terpilih dan meningkatnya potensi korupsi dalam pemerintahan (Begovic dan Cuan, 2021).

Di Kabupaten Soppeng, khususnya di Kecamatan Citta, isu politik uang menjadi perhatian yang serius. Banyak faktor yang mendukung terjadinya praktik ini, seperti rendahnya tingkat literasi politik masyarakat, pengaruh budaya patronase, dan kurangnya kesadaran akan pentingnya memilih berdasarkan kualitas calon pemimpin. Kondisi ini diperparah oleh minimnya pengawasan terhadap pelaksanaan pemilu dan lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku politik uang.

Untuk menangkal praktik politik uang, kampanye anti-politik uang menjadi salah satu solusi strategis yang diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya dan dampak negatifnya (Padilah dan Irwansyah, 2023). Kampanye ini bertujuan untuk membangun pemahaman bahwa suara masyarakat adalah hak yang tidak dapat dibeli, melainkan harus digunakan secara bijak demi terciptanya pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan berpihak pada kepentingan publik.

Namun, efektivitas kampanye tersebut sering kali menjadi tantangan, terutama di wilayah pedesaan seperti Citta, di mana akses informasi dan edukasi politik masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana kampanye anti-politik uang mampu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengidentifikasi, memahami, dan menolak politik uang. Dengan memahami efektivitas kampanye ini, diharapkan dapat menjadi strategi yang lebih tepat sasaran untuk memperkuat kesadaran masyarakat dan menekan praktik politik uang dalam pemilu mendatang.

Selain itu, penting untuk menyoroti bahwa kampanye anti-politik uang tidak hanya berfokus pada penyampaian informasi, tetapi juga pada upaya mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat (Fitriani, et al., 2019). Masyarakat perlu memahami bahwa politik uang tidak hanya merugikan proses pemilu, tetapi juga memengaruhi kualitas hidup mereka secara langsung. Pemimpin yang terpilih melalui politik uang cenderung lebih berorientasi pada kepentingan pribadi atau kelompok tertentu dibandingkan pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Di sisi lain, faktor sosial dan budaya setempat juga menjadi tantangan yang signifikan. Di Kecamatan Citta, budaya patronase yang kuat sering kali membuat masyarakat merasa "berutang budi" kepada kandidat yang memberikan uang atau barang. Hal ini menciptakan dilema moral, di mana masyarakat sulit menolak pemberian tersebut meskipun mereka tahu praktik ini tidak benar. Oleh karena itu, kampanye anti-politik uang perlu disesuaikan dengan konteks lokal, dengan melibatkan tokoh masyarakat, pemuka agama, dan kelompok pemuda sebagai agen perubahan yang memiliki pengaruh besar di tingkat komunitas (Iriani, et al., 2024).

Pemanfaatan teknologi dalam kampanye ini menjadi efektif apabila dilakukan melalui media sosial dan platform komunikasi daring untuk menyebarkan pesan-pesan anti-politik uang, terutama di kalangan generasi muda. Konten kreatif, seperti video pendek,

infografis, dan testimoni dari masyarakat yang berhasil menolak politik uang, dapat menjadi cara yang menarik untuk menjangkau lebih banyak orang (Putri dan Agustina, 2024).

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fauzi (2021) menungkap fenomena politik uang pada pemilihan Kepala Desa Patiken tahun 2018, menuturkan bahwa penelitian tersebut bertujuan untuk melihat berbagai alasan mengapa masyarakat tergiur dengan uang yang diberikan. Kenyataan yang diperoleh bahwa masyarakat mengambilnya karena minat masyarakat untuk datang ke TPS (Tempat Pemilihan Suara) dapat berubah dengan uang. Selain itu, pengetahuan masyarakat juga kurang terhadap pentingnya pemilihan pemimpin yang bersih tanpa politik uang.

Melalui pengabdian masyarakat ini, pengabdian berharap dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang efektivitas kampanye anti-politik uang di Kecamatan Citta, Kabupaten Soppeng. Temuan penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan wawasan tentang tingkat kesadaran masyarakat mengenai bahaya politik uang, tetapi juga menjadi landasan untuk merancang strategi kampanye yang lebih inovatif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, langkah menuju pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas dapat diwujudkan, sehingga akan mendukung demokrasi yang sehat dan pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia.

#### **METODE**

Pengabdian masyarakat dilaksanakan di Kecamatan Citta, Kabupaten Soppeng selama dua bulan yang dimulai pada awal Oktober hingga akhir November. Pengabdian ini dilakukan di Kecamatan Citta, Kabupaten Soppeng, yang dipilih berdasarkan tingginya tingkat kerentanan terhadap praktik politik uang selama pelaksanaan pemilu. Subjek sasaran meliputi

1. Masyarakat setempat, terutama pemilih yang menjadi target kampanye.
2. Tokoh masyarakat, pemuka agama, dan tokoh pemuda yang berperan dalam sosialisasi anti-politik uang.
3. Penyelenggara pemilu (KPU atau Bawaslu setempat) yang memiliki data dan informasi terkait pelaksanaan kampanye.

Pelaksanaan pengabdian ini melalui 3 tahapan yakni, tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di Kecamatan Citta, Kabupaten Soppeng menunjukkan perkembangan signifikan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya partisipasi aktif dalam proses demokrasi yang bersih dan bermartabat. Program ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang dampak buruk politik uang serta pentingnya memilih pemimpin berdasarkan kualitas, integritas, dan visi mereka, bukan karena iming-iming materi.

Hasil utama dari pengabdian masyarakat yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kesadaran tentang politik uang
 

Masyarakat semakin memahami bahwa politik uang adalah ancaman besar bagi demokrasi yang sehat. Melalui diskusi, pelatihan, dan kampanye, mereka diberikan contoh konkret bagaimana praktik politik uang merusak legitimasi pemimpin yang terpilih dan mengancam keadilan sosial.
2. Penguatan kesadaran untuk datang ke TPS

Program ini berhasil menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam Pemilu. Masyarakat menyadari bahwa suara mereka merupakan kekuatan utama untuk menentukan masa depan daerah dan bangsa, sehingga tidak boleh disia-siakan atau diperjualbelikan.

3. Dukungan terhadap pemimpin yang berkualitas

Setelah kegiatan ini, masyarakat lebih termotivasi untuk memilih berdasarkan nilai dan program kerja yang ditawarkan oleh kandidat, bukan berdasarkan janji manis atau pemberian uang. Hal ini diharapkan dapat mendorong munculnya pemimpin-pemimpin yang lebih kompeten dan berintegritas.

4. Keterlibatan pemuda dan perempuan

Pengabdian ini juga memberikan perhatian khusus dalam melibatkan kelompok pemuda dan perempuan sebagai agen perubahan. Mereka didorong untuk menjadi pelopor dalam menyuarakan penolakan politik uang dan memastikan hak pilih digunakan secara bijaksana.

Hasil pengabdian masyarakat tersebut diperoleh melalui tahapan-tahapan pelaksanaan sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan

Tahap persiapan ini dilaksanakan pada tanggal 1 – 5 Oktober 2024, tim pengabdian pada tahapan ini melakukan perizinan kepada pemerintah setempat untuk melaksanakan kegiatan pengabdian, kemudian mempersiapkan segala bentuk sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan program.



Gambar 1. Tahap Persiapan

## 2. Tahap Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan ini berlangsung pada tanggal 15 Oktober 2024. Tim pengabdian bekerja sama dengan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Citta dalam melakukan sosialisasi kampanye politik uang kepada masyarakat setempat. Sosialisasi dilakukan melalui pembagian brosur secara langsung. Wawancara dilakukan untuk mengetahui tanggapan masyarakat, kemudian tahapan diakhiri dengan dokumentasi sebagai bukti pelaksanaan program.



Gambar 2. Tahap Pelaksanaan

## 3. Tahap Evaluasi

Evaluasi ini merupakan tahapan untuk melihat sejauh mana pemahaman masyarakat setelah membaca dan memahami brosur yang dibagikan.



Gambar 3. Tahap Evaluasi

Rekomendasi sebagai tindak lanjut yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan berkelanjutan

Program edukasi tentang bahaya politik uang perlu dilakukan secara berkesinambungan, termasuk memasukkannya dalam kurikulum pendidikan informal seperti kegiatan PKK, karang taruna, atau kelompok masyarakat lainnya.

2. Penguatan regulasi lokal:

Pemerintah daerah dan lembaga terkait dapat memperkuat regulasi serta mekanisme pengawasan untuk mencegah praktik politik uang menjelang Pemilu.

3. Kampanye anti-politik uang yang kreatif:

Media sosial, seni, dan budaya lokal menjadi media untuk menyampaikan pesan-pesan anti-politik uang secara lebih menarik dan menjangkau audiens yang lebih luas.

4. Membangun komitmen kolektif:

Masyarakat perlu terus didorong untuk membuat deklarasi kolektif menolak politik uang, yang dapat menjadi tekanan sosial bagi pihak-pihak yang mencoba melakukannya.

Melalui upaya-upaya ini, diharapkan dampak positif dari pengabdian masyarakat yang telah dilakukan di Kecamatan Citta dapat menyebar luas dan menjadi contoh baik bagi daerah lainnya. Semangat membangun demokrasi yang sehat harus terus dipupuk untuk memastikan dampak positif yang berkelanjutan.

Implementasi keberlanjutan program pengabdian dapat dilakukan untuk memastikan hasil yang dicapai dari pengabdian masyarakat di Kecamatan Citta dapat terus berlangsung dan memberikan dampak jangka panjang, diperlukan langkah-langkah strategis berikut:

1. Pembentukan kelompok anti-politik uang

Pembentukan kelompok kerja lokal di setiap desa bertugas mengedukasi masyarakat secara konsisten tentang bahaya politik uang. Kelompok ini dapat terdiri dari tokoh masyarakat, pemuda, dan aktivis lokal yang memiliki komitmen terhadap demokrasi bersih.

2. Peningkatan kesadaran melalui media lokal

Media lokal, baik cetak maupun elektronik dapat menjadi mitra dalam menyebarkan pesan penting mengenai bahaya politik uang. Penggunaan bahasa daerah dan pendekatan budaya lokal menjadikan pesan-pesan yang akan disampaikan lebih mudah dipahami.

3. Kemitraan dengan pemerintah dan lembaga Pemilu

Pemerintah daerah dan lembaga pemilu, seperti KPU dan Bawaslu perlu dilibatkan secara aktif untuk memperkuat pengawasan dan memberikan dukungan terhadap gerakan masyarakat

## SIMPULAN

Pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di Kecamatan Citta, Kabupaten Soppeng, telah menunjukkan hasil yang sangat positif dalam upaya membangun kesadaran politik warga. Melalui berbagai program edukasi dan pemberdayaan, kegiatan ini berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bahaya praktik politik uang serta pentingnya keterlibatan aktif dalam proses Pemilihan Umum (Pemilu). Masyarakat mulai menyadari bahwa hak pilih yang mereka miliki adalah bagian penting dari hak demokratis yang tidak sepatutnya diperjualbelikan. Lebih jauh lagi, mereka memahami bahwa memilih pemimpin berdasarkan integritas, kompetensi, dan rekam jejak yang baik merupakan fondasi utama untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi daerah mereka.

Keberhasilan program ini tidak terlepas dari strategi pendekatan partisipatif yang mengedepankan kolaborasi antara masyarakat, pemerintah daerah, dan berbagai lembaga terkait. Kerjasama yang erat ini membuktikan bahwa perubahan menuju demokrasi yang bersih dan bermartabat bukan sekadar idealisme, melainkan sesuatu yang dapat dicapai melalui langkah nyata dan terukur. Melibatkan berbagai elemen dalam masyarakat memperkuat legitimasi program sekaligus menumbuhkan rasa kepemilikan terhadap gerakan anti-politik uang. Namun demikian, capaian ini harus dipandang sebagai awal dari perjalanan panjang dalam membangun budaya demokrasi yang sehat. Untuk mempertahankan dan memperluas dampak positif yang telah dihasilkan, tindak lanjut yang berkelanjutan menjadi sangat penting. Edukasi politik harus terus dilakukan secara intensif dan meluas, khususnya kepada generasi muda sebagai pemilih masa depan. Selain itu, penguatan regulasi untuk menekan praktik politik uang, pemberdayaan ekonomi masyarakat agar mereka tidak mudah tergoda oleh iming-iming sesaat, serta sistem pemantauan yang transparan dan partisipatif perlu terus dikembangkan.

Secara keseluruhan, program pengabdian ini menjadi bukti nyata bahwa perjuangan melawan politik uang dan pembangunan demokrasi yang sehat bukanlah hal yang mustahil. Dengan komitmen yang kuat, perencanaan yang matang, serta keterlibatan aktif semua pihak, perubahan menuju kehidupan politik yang lebih bermartabat dapat diwujudkan. Proses ini memang membutuhkan waktu, kesabaran, dan ketekunan, namun kesuksesan awal di Kecamatan Citta membuktikan bahwa setiap langkah kecil yang dilakukan bersama dapat membawa perubahan besar bagi masa depan demokrasi Indonesia.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kami ucapkan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar, dosen pendamping lapangan, teman-teman, dan Bawaslu Soppeng beserta masyarakat Kelurahan Citta Kabupaten Soppeng atas partisipasinya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Begovic, M. E. H., & Cuan, B. (2021). Money Politik Pada Kepemiluan di Indonesia. *Sol Justicia*, 4(2), 105-122.
- Fauzi, S. A., & Fauzi, A. M. (2021). Fenomena Money Politik pada Pemilihan Kepala Desa Petiken Tahun 2018. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 23(1), 171-179.
- Fitriani, L. U., Karyadi, L. W., & Chaniago, D. S. (2019). Fenomena Politik Uang (Money Politic) Pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat. *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*, 1(1), 53-61.
- Iriani, D., Munawaoroh, D. N., & Marvinda, E. S. (2024). Tinjauan Teori Critical Legal Studies Dalam Pandangan Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Ponorogo Terkait Pencegahan Money Politic Pemilu 2024. *El-Dusturie*, 3(1), 15-28.
- Nabila, N., Prananingtyas, P., & Azhar, M. (2020). Pengaruh money politic dalam pemilihan anggota legislatif terhadap keberlangsungan demokrasi di indonesia. *Notarius*, 13(1), 138-153.
- Padilah, K., & Irwansyah, I. (2023). Solusi terhadap money politik pemilu serentak tahun 2024: mengidentifikasi tantangan dan strategi penanggulangannya. *Jurnal EDUCATION: Jurnal Pendidikan Indonesia*, 9(1), 236-250.
- Putri, H. N. A. M., & Agustina, I. F. (2024). Peran Bawaslu Dalam Mencegah Praktik Money Politic Pada Pemilu di Kota Surabaya. *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)*, 6(1), 37-50.